

SOLUSI PERMASALAHAN PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA MODERN MELALUI PENINGKATAN KEMAMPUAN MUSYAWARAH SEJAK DINI

Suyahmo¹, Moh. Aris Munandar²
Moharis.pkn@gmail.com

Abstrak: Ketika peristiwa reformasi bergulir di Indonesia, tampilah aktor politik yang memiliki karakter yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Karakter tersebut adalah egois (memikirkan diri dan golongannya), dominasi terhadap ide, dan pengambilan keputusan. Kondisi ini menjadikan kehidupan politik sebagai kehidupan yang penuh intrik untuk memenangkan kepentingannya yang muaranya adalah status ekonomi dan sosial. Berbeda dengan filosofi politik yang sebenarnya yaitu berargumentasi guna mencapai suatu kebijakan yang mementingkan rakyat. Penelitian tentang Peningkatan Kemampuan Musyawarah Sebagai Lokus Pengamalan Sila Ke 4 Pancasila Pada Jenjang SMP di Kota Semarang, kami menemukan bahwa Sekolah juga berfungsi sebagai penyuplai tokoh-tokoh politik yang otoriter dan mementingkan golongannya. Sekolah membiarkan siswa yang dominan terus menerus mendominasi dan siswa yang apatis terus menerus ditinggalkan. Model Peningkatan Musyawarah Sebagai Solusi Permasalahan Politik Indonesia Modern sebagai berikut: a) Guru memberi pengertian dulu, apa itu musyawarah; b) Guru menyiapkan materi yang akan dimusyawarahkan; c) Kelas dibagi menjadi lima kelompok besar, yang masing-masing terdiri dari 5 sampai dengan 10 siswa; d) Setiap siswa diberi tiga token (kupon), kupon tersebut ditulis nama siswa, kelompok serta nomor absen siswa. Setiap pemegang kupon memiliki hak bicara maksimal lima menit. Setiap siswa akan bertanya dan menyanggah pembicaraan maka siswa harus menyerahkan token (kupon) tersebut pada guru; e) Guru mempersilahkan siswa untuk membahas bahan musyawarah; f) Guru mempersilahkan salah satu siswa untuk memaparkan hasil musyawarah kelompok; g) Siswa diajak untuk mencari yang terbaik dari setiap pendapat; h) Siswa dilatih sensitifitasnya terhadap emosi dirinya serta emosi kelompoknya; i) Siswa diajak untuk menganalisis berbagai pendapat dari Sudut Pandang Diri Sendiri (SPDS) serta dari Sudut Pandang Orang Lain (SPOL); j) Siswa kemudian mengemukakan pendapatnya; k) Siswa mengambil kesimpulan.

Kata kunci: Kemampuan Musyawarah, Dini, Solusi Permasalahan, Proses Demokrasi, Indonesia Modern

PENDAHULUAN

Bung Hatta menyatakan tidak sekedar Demokrasi Ekonomi tetapi Demokrasi Sosial. Demokrasi Sosial menjamin bahwa manusia memiliki hak-hak yang dibutuhkan sebagai manusia. Pemikiran tentang demokrasi sudah

dimulai sejak Sidang BPUPK 1 Maret 1945, dimana tokoh-tokoh yang bersidang dalam acara tersebut, terdiri dari semua unsur yang ada di Indonesia seperti unsur etnis, agama, aliran pemikiran, aliran kepercayaan, profesi (Ramage. 2005:1-5). Zamroni (2011:14) memberikan arti

^{1,2}Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa saja yang berkuasa, merekalah yang memiliki kekuasaan dan berhak untuk memerintah. Kovacs (Zamroni, 2011:16) menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang mengembangkan individu melalui partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurutnya demokrasi memiliki dua arti: 1) Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan sesuai dengan makna harviah demokrasi (Lincoln, 2003:42-43), 2) Demokrasi sebagai sebuah nilai atau pandangan hidup. Megan Howey dalam Biesta (2011:23) menyatakan bahwa pendidikan demokrasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperkuat kebersamaan dan kerjasama dari seluruh komponen sekolah khususnya para guru, siswa, dan orang tua siswa.

Manusia dalam teori Kewarganegaraan (citizenship), seperti yang dikemukakan Marshal memiliki beberapa hak, antara lain: 1) Hak Sipil meliputi kebebasan dalam berpendapat, bergagasan dan berkeyakinan dan berhak atas properti, kontrak dan keadilan, 2) Hak Politik meliputi hak untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan dan pemilihan publik, 3) Hak sosial meliputi hak untuk keamanan dan kesejahteraan guna berbagi dalam warisan sosial dan untuk hidup dalam kehidupan yang lebih maju sesuai dengan standar-standar yang berlaku dalam masyarakat (Kalidjernih.2011: 5). Ketiga hak tersebut merupakan sesuatu yang secara minimalis harus dipunyai oleh setiap Warga Negara.

Mulyasa (2001) dalam Wuryan (2008 : 94-95) mengemukakan sebab-sebab terjadinya degradasi nilai-nilai demokrasi, yaitu: a) adanya kelompok yang menjadikan demokrasi sebagai komoditi yaitu menghalalkan berbagai cara dalam perilakunya dengan kedok demokrasi; b) Banyaknya pemikir yang berperan sebagai pekerja demokrasi; c) Pembangunan demokrasi terjebak pada pembicaraan hubungan antara konsep dan nilai; d) Pemikir politik dan demokrasi banyak yang dibangun secara spekulatif tanpa merujuk pada hasil riset; e) Konsep demokrasi tidak ditopang oleh supremasi hukum dan aspirasi riil; f) Tuntutan penegakan demokrasi tidak diikuti oleh perubahan sikap yang menekankan pada kesadaran hukum, tanggung jawab, profesionalisme, disiplin dan kerjasama. Sedangkan Easton (1963:3) menyatakan bahwa sistem politik akan dapat berjalan baik serta menghasilkan output yang baik bila mendapat dukungan (supporting system) serta mendapatkan tentangan (oposan system). Dukungan dan tentangan harus ada agar sistem politik dapat berjalan dengan seimbang. Keseimbangan antara tentangan dan dukungan baru dapat berjalan bila tidak ada pemutlakan dan penghilangan kebenaran.

Musyawahar berasal dari kata bahasa Arab yang diartikan oleh Moh Koesnoe sebagai pembahasan bersama untuk mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah bersama (Budiharjo. 1975: 53-54). Semenjak beberapa tahun pemerintah berusaha menginduksi kemampuan musyawarah ke warganya tetapi hasil yang dicapai belum begitu menggembirakan. Sebetulnya

Musyawarah sudah digunakan oleh bangsa Indonesia secara berabad-abad, karena itu founding fathers bangsa Indonesia menyinergikan antara musyawarah dengan hikmah kebijaksanaan, kerakyatan dan perwakilan, sinergi itu kemudian dijadikan sebagai Sila 4 Pancasila. Musyawarah menjadi membahas suatu masalah yang dipecahkan secara bersama-sama. Perkataan Musyawarah harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Musyawarah adalah suatu ciri khas dari pengambilan keputusan berdasarkan gagasan kerakyatan yang berpegang pada hikmah kebijaksanaan.
2. Masalah yang diperbincangkan adalah masalah yang hidup di dalam masyarakat yang menghendaki suatu pemecahan.
3. Menggunakan pikiran sehat yang mempertimbangkan kesejahteraan umum.
4. Pertimbangan ini harus diolah menuju kepada kebulatan fikiran dari semua peserta
5. Semua peserta termasuk mereka yang memberi amanat harus menjalankan keputusan ini dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab (Moh Kosnoe dalam Budiharjo. 1975:65)

Musyawarah terkait pula dengan “kebulatan kehendak” dan “permufakatan”. Kebulatan kehendak diartikan tidak ada persoalan terkait perjuangan kepentingan, kebulatan kehendak merupakan akibat dari pertukaran pikiran yang dilakukan dalam suasana ingin memberi sumbangan bagi

kepentingan masyarakat seluruhnya. Semua pihak tidak berhadapan satu dengan yang lain, tetapi bahwa mereka merupakan bagian dari satu keseluruhan yang bersama-sama hendak menuju satu tujuan. Sedangkan permufakatan berarti adanya dua atau lebih pihak yang saling berbeda kepentingannya, hasil dari saling memberi dan menerima. Tetapi dalam pasal 1 Ketetapan MPRS No XXXVII/1968 arti mufakat itu hampir sama dengan kebulatan kehendak. Dalam pasal 2 Tap MPRS No XXXVII mengemukakan konsepsi terkait musyawarah sebagai berikut:

1. Musyawarah bersendikan kesadaran dan rasa tanggungjawab bersama dari pimpinan dan para peserta atas hak dan kewajiban masing-masing untuk menghadiri musyawarah. Oleh karena itu pada dasarnya seluruh pimpinan dan anggota musyawarah wajib menghadirinya.
2. Musyawarah dapat diadakan apabila seluruh golongan musyawarah terwakili atau sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota hadir dalam hal tidak semua golongan-golongan musyawarah terwakili.

Penelitian ini berusaha mencari akar permasalahan politik demokrasi di Indonesia dengan menggunakan nilai-nilai dasar yang di miliki bangsa Indonesia yaitu Pancasila, khususnya sila ke 4. Penelitian ini akan diungkap bagaimana peningkatan kemampuan musyawarah akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Apa kelemahan dan kekuatan penerapan musyawarah sebagai lokus pendidikan demokrasi, Bagaimana model

penerapan musyawarah sebagai pengamalan Sila 4. Pendekatan penelitian dan pengembangan (research and development) merupakan pendekatan penelitian untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan pengujian suatu produk.

TINJAUAN PUSTAKA

Demokrasi tidak sekedar pilihan bebas saja, tetapi demokrasi terkait dengan kadar kebebasan, sejauhmana mana manusia dapat mendapatkan manfaat dari kebebasan. Karena itu, Bung Hatta menyatakan tidak sekedar Demokrasi Ekonomi tetapi Demokrasi Sosial. Demokrasi Sosial menjamin bahwa manusia memiliki hak-hak yang dibutuhkan sebagai manusia. Pemikiran tentang Demokrasi sudah dimulai sejak Sidang BPUPK 1 Maret 1945, dimana tokoh-tokoh yang bersidang dalam acara tersebut, terdiri dari semua unsur yang ada di Indonesia seperti unsur etnis, agama, aliran pemikiran, aliran kepercayaan, profesi (Ramage, 2005:1-5). Megan Howey dalam Biesta (2011:23) menyatakan bahwa pendidikan demokrasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperkuat kebersamaan dan kerjasama dari seluruh komponen sekolah khususnya para guru, siswa, dan orang tua siswa. Lebih lanjut John Dewey dalam Zamroni (2007:50) menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi adalah toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, terbuka dalam menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, mampu mengendalikan diri sehingga tidak mengganggu orang

lain, kebersamaan dan kemanusiaan, percaya diri tidak mengutamakan diri sendiri pada orang lain dan taat pada peraturan yang berlaku. Shirley Engle dan Anna S. Ochoa (1988) dalam Sri Wuryan (2008:95-96) menekankan bahwa pentingnya pendekatan pembelajaran demokrasi dengan mengunggulkan pendekatan keterampilan pengambilan keputusan (decision making process). Biesta (2010, 1-6) demokrasi perlu dijamin dalam pendidikan Sekolah disebabkan; 1) tingkat partisipasi politik yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, 2) pemahaman politik yang turun, dan 3) kohesi dan integrasi sosial yang makin parah.

Kerakyatan, kata dasarnya “rakyat” mengandung arti : sekelompok manusia yang menjadi warga dalam suatu negara. Sedangkan “kerakyatan” mengandung arti : suatu sistem pemerintahan negara atas dasar pertimbangan kehendak rakyat. Kerakyatan juga berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, sehingga pemerintahannya disebut pemerintahan rakyat yaitu , dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan inilah yang dinamakan “demokrasi”. Perkembangan sekarang bahwa kerakyatan atau demokrasi tidak hanya meliputi bidang pemerintahan atau politik semata-mata, tetapi meliputi juga bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial dan kebudayaan. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh kerakyatan atau demokrasi tidak lain adalah untuk mewujudkan satu “kebahagiaan”. Dalam konteks demokrasi Pancasila, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang telah diungkapkan

di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kebahagiaan hidup yang bersifat umum, berupa kebahagiaan hidup bersama atau kesejahteraan bersama yang memperhatikan kesejahteraan individu (Suyahmo, 2014:40).

Hikmat Kebijaksanaan. “Hikmat” adalah suatu kebenaran yang mengandung manfaat bagi kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Hikmat ini yang menjadi sumbernya adalah Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian sila pertama menjiwai sila keempat harus memperhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan. “Kebijaksanaan” merupakan perbuatan manusia yang didasarkan atas dorongan kehendak yang baik, dan putusan akal untuk mencapai kebenaran yang sesuai dengan rasa kemanusiaan. Jadi “hikmat kebijaksanaan” merupakan konsep yang dapat dijadikan dasar pertimbangan yang sangat baik, karena menghubungkan dua hal fundamental yaitu : Firman Tuhan dan pemikiran manusia. Dua hal ini harus diperhatikan sebagai dasar untuk memimpin kerakyatan, terutama bagi negara-negara yang di dalamnya ajaran-ajaran agama tumbuh dengan subur. Bilamana hanya menitik beratkan pada firman Tuhan saja tanpa akal pikiran maka akan kehilangan maknanya, sebaliknya jika akal pikiran menjadi perhatian utamanya tanpa dilandasi firman Tuhan juga kehilangan maknanya bahkan dapat tersesat. Oleh karena itu kedua-duanya harus diperhatikan dalam mencapai kebahagiaan hidup manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa, kerakyatan dalam konteks sila keempat harus dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,

serta dilandasi oleh semangat persatuan (Suyahmo, 2014:42)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan agar diperoleh informasi-informasi yang lebih mendalam berkaitan dengan identifikasi Kemampuan Musyawarah Siswa SMP. Untuk melengkapi usaha pengumpulan data, maka penelitian ini mengambil data dari berbagai sumber: (1) Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dengan jalan partisipatoris, menyebar angket dan interview terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan memahami permasalahan pembelajaran Pancasila. (2) Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari subyek penelitian, antara lain dengan memanfaatkan data yang telah diolah, literatur, koran-koran, hasil penelitian, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara antara lain, meliputi wawancara baik yang terstruktur maupun tidak. Penyebaran angket/ kuesioner yang diberikan kepada responden dan studi pustaka yaitu melihat buku-buku, jurnal, dokumen atau bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Musyawarah

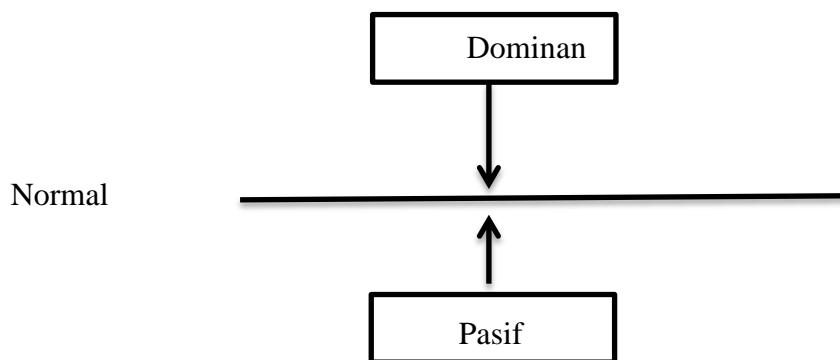
Kontruksi musyawarah bagi siswa diartikan sebagai diskusi, saling berpendapat, saling mengemukakan pendapat, demokrasi, kebebasan bicara,

berbicara tanpa dihambat. Siswa belum banyak yang mengkaitkan musyawarah dengan Sila ke IV dari Pancasila. Ketika ditanya apakah ada temanmu yang mendominasi pembicaraan, maka siswa menjawab bahwa ada siswa yang terus menerus menjawab atau mengemukakan pendapat, tetapi ada pula siswa yang terus menerus diam saja, tidak mengemukakan pendapatnya. Berarti ada siswa yang aktif, terlalu aktif, pasif, terlalu pasif. Praktik musyawarah biasanya dilakukan dengan diskusi dengan mengelompok-kelompokan siswa dalam jumlah antara 5 sampai dengan 10 orang. Satu kelompok biasanya duduk melingkar, dalam kelompok itu biasanya ditunjuk pimpinan kelompok serta notulen yang akan mencatat setiap usulan atau pernyataan dari anggota kelompok. Pengelompokan ini dilakukan untuk membahas suatu permasalahan yang biasanya ditentukan oleh guru.

Setiap kelompok akan membahas permasalahan yang diberikan. Anggota kelompok tersebut ada yang pasif tetapi ada yang aktif, ada yang dominan bahkan cenderung mendominasi tetapi adapula kurang partisipasi. Biasanya hasil pembahasan kelompok ini akan didiskusikan secara pleno di kelas. Di dalam pleno, siswa akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Siswa dari kelompok lain akan bertanya atau menyanggah jawaban dari kelompok yang memaparkan hasil diskusinya. Siswa yang aktif akan terus bertanya, sedangkan siswa yang pasif akan bertanya kalau disuruh teman atau gurunya. Kondisi ini menjadikan apa yang terjadi dengan per

anggota kurang begitu terpantau. Apalagi kalau gurunya hanya satu orang saja. Suatu kelompok diskusi; mungkin akan muncul siswa yang ingin mendominasi pendapat orang lain. Akan muncul siswa yang memaksakan kehendaknya agar semua anggota menuruti apa yang diusulkannya, demikian pula sebaliknya akan muncul siswa yang terlalu apatis tidak mau berpendapat, cenderung tidak urusan dengan apa yang akan didiskusikan. Siswa akan terkategori menjadi empat dalam diskusi yang biasa dilakukan di kelas yaitu: 1) Demokratis; 2) Normal (sedang/ biasa); 3) Dominan; 4) Apatis.

Muncul suatu problem, apakah siswa yang dominan diperbolehkan dalam diskusi? yang tidak diperbolehkan adalah siswa yang mendominasi (melakukan dominasi) terhadap pendapat siswa lainnya. Dia memaksakan kehendaknya agar diikuti oleh pihak lainnya. Dengan demikian metode diskusi kalau kita tidak hati-hati akan melahirkan orang yang tidak demokratis (ademokratis). Di samping itu juga dapat pula melahirkan orang yang apatis yaitu orang yang tidak peduli dengan pendapat orang lain. Metode Diskusi harus diarahkan agar siswa masuk dalam kategori normal yakni dapat menerima pendapat orang lain, mampu bertoleransi serta mampu mengemukakan pendapat secara baik, santun dan jelas. Sehingga metode diskusi tidak sekadar dijadikan ajang untuk latihan bicara atau mengemukakan pendapat saja. Guru harus menyusun sintaks pembelajaran yang dapat mengawasi aktivitas setiap siswa.



Gambar 1. Kondisi Siswa Dalam Musyawarah

Pelaksanaan diskusi harus pula di dukung dengan penerapan pendidikan demokrasi. Penerapan pendidikan demokrasi berarti, praktik pendidikan harus dalam nuansa demokratis. Seringkali kita saksikan bahwa praktik pendidikan tidak mencerminkan nuansa yang demokratis, yakni membiarkan orang yang apatis menjadi apatis serta membiarkan orang yang cenderung mendominasi orang lain menjadi tetap dominan. Kondisi ini berarti kita akan melahirkan orang yang tiran dan orang yang tidak berpartisipasi. Ada sekolah yang selalu menjadikan ketua kelas adalah siswa yang itu itu saja. Memang siswa yang dominan memiliki kompetensi serta keterampilan yang lebih dibandingkan siswa lainnya. Kondisi ini menjadikan guru harus melakukan pembinaan yang tepat terhadap kategori siswa seperti ini, mereka memiliki talenta untuk memimpin tetapi harus disadarkan bahwa ada pendapat orang lain, ada sudut pandang orang lain (SPOL) , bukan hanya sudut pandang dirinya sendiri (SPDS).

Siswa yang memiliki kecenderungan apatis biasanya memiliki berbagai

permasalahan dalam memandang metode diskusi seperti; 1) memandang bahwa diskusi tidak ada gunanya, hanya menghabiskan waktu saja, 2) memiliki masalah dalam komunikasi seperti tidak terbiasa untuk berbicara di depan umum, cara komunikasinya belum bagus, 3) memiliki rasa malu yang berlebihan untuk berpendapat di depan umum. Guru juga harus memperhatikan kategori ini, karena kalau dibiarkan, dia akan menjadi manusia yang masa bodoh dengan sekitarnya. Demikian pula dengan siswa kategori normal, siswa ini dapat tertarik menjadi dominan, atau dapat pula tertarik menjadi apatis. Dengan demikian guru harus mengarahkan siswa menjadi orang yang demokratis. Karakter demokratis memiliki ciri menurut John Dewey dalam Zamroni (2007:50) bahwa nilai-nilai demokrasi adalah toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, terbuka dalam menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, mampu mengendalikan diri sehingga tidak mengganggu orang lain, kebersamaan dan kemanusiaan, percaya diri tidak mengutamakan diri

sendiri pada orang lain dan taat pada peraturan yang berlaku.

Dengan demikian karakter demokratis itu menyeimbangkan antara SPOL (Sudut Pandang orang lain) dengan SPDS (sudut pandang dirinya sendiri) ditambah dengan cara penyampaian yang tidak menyinggung orang lain. Metode diskusi harus dikembangkan lebih lanjut, karena diskusi merupakan metode yang netral. Inilah fungsinya guru, bila gurunya tidak memahami apa esensi karakter demokrasi maka siswa yang dominan akan berkembang menjadi siswa yang egois dan mau menang sendiri, siswa dapat tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, bahkan siswa berpikir bahwa lingkungan yang harus sependapat dengan siswa tersebut. Musyawarah akan memadukan SPOL (Sudut Pandang Orang Lain) dengan SPDS (Sudut Pandang Diri Sendiri). Pemaduan ini bukan dilaksanakan dengan pemaksaan, agar dia mau menerima pemikiran kita atau agar kita terpaksa mau menerima pemikiran dia.

Kemampuan untuk memadukan antara SPOL dengan SPDS akan meningkatkan kemampuan siswa dalam bermusyawarah. Musyawarah dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *deliberation* (Koichi Kawamura, 2011). Selanjutnya Koichi menyatakan dalam konteks Indonesia “*democracy guided by the inner wisdom deliberation of representative*”. Dengan demikian untuk meningkatkan kemampuan musyawarah minimal kita harus mengajarkan, menginternalisasi dan membiasakan siswa dengan : 1) mencari *inner wisdom*, 2)

deliberation atau permusyawaratan, dan 3) *representative*.

Pembiasaan untuk selalu mencari *inner wisdom* (hikmat kebijaksanaan) dalam setiap diskusi, mewajibkan untuk selalu berpikir mencari kebenaran dan bukan mencari kemenangan. Ketika siswa berpikir untuk mencari kebenaran maka yang terjadi adalah siswa akan memberikan penghargaan terhadap pemikiran orang lain, bukan menghalangi orang lain berpikir. Siswa akan selalu menghargai pendapat orang lain.

Menjadikan siswa agar selalu menghargai pendapat orang lain, bahkan siswa memiliki rasa sensitivitas apakah pendapatnya itu mendukung mencari kebenaran atau bahkan menjadi penghambat dalam mencari kebenaran. Ketika siswa menyadari bahwa dia harus berkontribusi mencari kebenaran, maka dia akan selalu bersinergi dengan pendapat orang lain. Ketika dia tidak setuju suatu pendapat, bukan karena orangnya tetapi karena pendapat tersebut menurut pemikirannya jauh dari kebenaran. Kemampuan membedakan, menganalisis, menyimpulkan akan menjadikan siswa bisa menemukan suatu “*hikmat kebijaksanaan*”. Sayidina Ali ra menyatakan “*pendapat banyak kepala akan lebih baik dibandingkan pendapat satu kepala*”.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam musyawarah ; 1) Toleransi merupakan sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi hak setiap individu, hak untuk mengemukakan pendapat. Pendirian masing-masing pihak dapat berbeda tetapi harus tetap saling menghormati; 2) kebebasan berpendapat

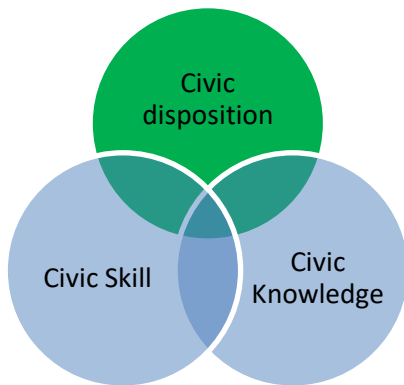
dilakukan dengan menjunjung tinggi keragaman pendapat dari masing-masing individu. Individu harus dapat berpendapat tanpa ada tekanan atau paksaan. Salah satu individu yang demokratis adalah dapat menyampaikan pendapatnya. Di sinilah peran guru sangat dibutuhkan di dalamnya yaitu untuk melatih kepada para siswa agar berani mengemukakan pendapatnya; 3) Saling hormat menghormati.

Menghormati orang lain atau kelompok lain diperlukan dalam membina rasa toleransi pada diri seseorang. Misalnya dalam pelaksanaan metode diskusi apabila dalam kelas terjadi perdebatan antara kelompok yang satu dengan yang lain guru PKn disini bertugas untuk menengahi dan menetralsir keadaan tersebut. Kerjasama sangat dibutuhkan untuk melatih agar siswa nantinya dapat berkumpul dan berinteraksi dengan baik di masyarakat luas; 4) Melatih pengendalian diri siswa. Nilai pengendalian diri dalam kehidupan berdemokrasi mutlak diperlukan agar setiap perbuatan yang dilakukan tidak merugikan orang lain; 5) Melatih sikap percaya diri. Sikap percaya diri sangat penting dimiliki oleh setiap anggota masyarakat untuk mengurangi adanya sikap yang selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Dalam hal ini diharapkan dengan adanya rasa percaya diri siswa akan lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya dimuka umum; 6) Ketaatan pada peraturan yang berlaku; 7) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan; 8) Mengutamakan

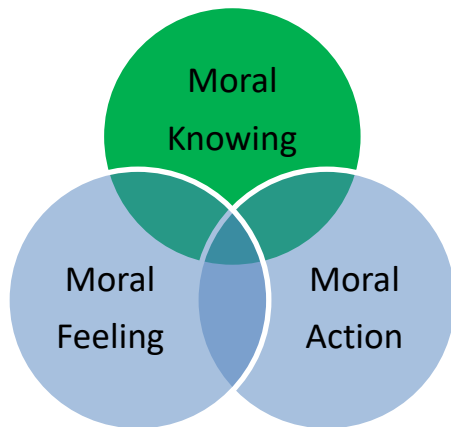
kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu atau golongan.

Kekuatan dan Kelemahan Penerapan Musyawarah

Sarana dan prasarana seperti meja bundar masih jarang ditemukan di sekolah. Biasanya siswa akan mencari tempat duduk dan diatur agar berhadapan dengan teman-temannya. Meja yang melingkar dan ringan sehingga mudah dijunjung akan memudahkan siswa untuk berganti kelompok berpindah antara temannya. Di samping itu kumpulan permasalahan masih belum dimiliki oleh guru. Guru biasanya mencari masalah-masalah yang aktual. Presentasi yang dilakukan oleh siswa masih dalam bentuk yang sederhana, siswa biasanya akan membagi kelompoknya menjadi; ada yang bertindak sebagai juru bicara, moderator dan notulen. Persoalan-persoalan yang dibahas masih sebatas persoalan kognitif dan belum aktual, sehingga sebatas pembicaraan saja (berlatih untuk mengemukakan pendapat). Musyawarah tidak hanya menyangkut bicara dan kemampuan bicara, tetapi juga menyangkut “pembicaraan tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki kemanfaatan bersama”, sehingga hasil musyawarah itu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang membedakan dengan diskusi, diskusi sebatas bertukar pikiran saja, tetapi musyawarah tidak sebatas bertukar pikiran tetapi sudah menyangkut moral action. Seperti yang selalu diajarkan dalam Pendidikan Civic sebagai berikut:



Gambar 2. Intisari Pendidikan Civic



Gambar 3. Pendidikan Moral dalam Civic

Musyawarah tidak hanya melatih siswa untuk mengetahui saja, mengeksplorasi suatu permasalahan saja, tetapi musyawarah bertujuan pula agar siswa dapat melakukan moral action. Sehingga hasil pembicaraan tersebut menjadi suatu kegiatan yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam penelitian ini yang di musyawarahkan seringkali sebatas hal-hal yang abstrak, sehingga seolah siswa hanya berlatih retorika belaka. Siswa hanya berlatih berbicara dan berpendapat tetapi tidak berlatih melaksanakan apa yang dibicarakan, sehingga ada konsistensi

antara apa yang dibicarakan dengan apa yang dilakukan. Konsistensi antara “apa yang dibicarakan” dengan “apa yang dilakukan” belum banyak dilakukan dalam praktik musyawarah di Sekolah. Praktik musyawarah lebih di dominasi “latihan untuk mengemukakan pendapat”, “latihan bertukar pendapat”, “keberanian mengemukakan pendapat”. Bila kita hanya melatih siswa berbicara saja, tanpa melatih agar bertanggungjawab terhadap apa yang dibicarakan, maka berarti kita menyemai demokrasi yang tidak memiliki kemanfaatan sosial karena berpolitik demi kepentingan politiknya. Sehingga kita harus mengkaitkan antara pembicaraan tidak sekadar bicara tetapi pembicaraan dengan mengkaitkan dimensi tanggung jawab dan dimensi kepentingan bersama. Dimensi tanggungjawab menjadikan siswa untuk merasakan (moral feeling); apakah implikasi dari putusan yang diambil (yang dibicarakan).

Model Penerapan Musyawarah Sebagai Solusi Proses Politik Sejak Jenjang Sekolah Menengah

Pelaksanaan “SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN” memiliki nilai antara; 1) Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat, 2) Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, 5) Dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan

melakssiswaan hasil keputusan musyawarah, 6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, 7) Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diatas merupakan versi Eka Prasetya Pancakarsa, tafsir Pancasila yang sering didengarkan masa orde baru.

Kalau kita analisis pengamalan sila Pancasila nilai-nilai diatas maka ada beberapa nilai inti; 1) mementingkan kepentingan negara dan masyarakat, 2) adanya musyawarah sebagai pengambilan keputusan bersama dengan mufakat dengan kekeluargaan, itikad baik, rasa tanggungjawab menerima keputusan, siswa dapat melaksanakan hasil musyawarah, penggunaan akal sehat, hati nurani luhur, keputusan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan YME, Harkat martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dengan demikian dalam mengembangkan karakter demokratis yang utama adalah mengajarkan siswa untuk melakukan musyawarah.

Perbedaan musyawarah dan diskusi adalah merupakan istilah yang netral, dalam diskusi orang dapat mencapai siapa yang menang dan siapa yang kalah, dalam diskusi orang tidak memperdulikan siapa yang dominan. Diskusi kadang orang berpikir secara tim, agar apa yang akan diusulkan dapat diterima oleh seluruh peserta. Sedangkan musyawarah merupakan konsep diskusi yang asli Indonesia, dalam musyawarah yang

dipikirkan adalah mencapai keputusan yang dianggap paling utama berdasarkan hati nurani, pertimbangan akal sehat, serta dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Dengan demikian pengembangan keterampilan demokrasi dapat dilakukan terlebih dahulu dengan meningkatkan kemampuan musyawarah diantara siswa. Untuk mempraktikkan musyawarah maka siswa harus diberi pengertian dulu apa itu musyawarah. Sehingga langkah pertama adalah menyadarkan siswa tentang keunggulan musyawarah. Model peningkatan musyawarah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Guru memberi pengertian dulu, apa itu musyawarah. Pemahaman tentang makna musyawarah bagi siswa sangat penting, musyawarah tidak boleh sekadar dijadikan arena untuk mencari kemenangan dalam berdiskusi, tetapi harus berpedoman mencari hikmah kebijaksanaan untuk mencapai suatu konsensus.
2. Guru menyiapkan materi yang akan dimusyawarahkan. Materi musyawarah jangan hanya bernuansa kognitif atau pengembangan pemikiran belaka. Kalau bernuansa pemikiran belaka, musyawarah akan menjadi ajang retorika; sekadar latihan berbicara. Dalam musyawarah harus dimunculkan rasa tanggung jawab, rasa hormat menghormati pemikiran orang lain. Dengan demikian sensitivitas dan pengendalian diri siswa harus dimunculkan. Materi musyawarah harus dapat dijadikan

program kegiatan. Sehingga dapat memadukan antara pembicaraan dengan aksi yang dilakukan. Guru harus membuat materi musyawarah secara gradual; mulai dari materi yang dapat diputuskan secara kelompok dengan mudah, sampai kepada materi dimana untuk mencapai keputusan bulat memerlukan waktu secara bertahap.

3. Kelas dibagi menjadi lima kelompok besar, yang masing-masing terdiri dari 5 sampai dengan 7 siswa. Pembagian kelompok dalam musyawarah dapat digunakan untuk efektivitas pembicaraan. Kelompok dapat dibagi kelompok kecil, kelompok menengah dan kelompok besar. Guru dapat mencoba membagi dalam kelompok kecil dulu, setelah efektif dalam kelompok kecil, guru dapat menggabungkan menjadi kelompok menengah, setelah efektif dalam kelompok menengah guru dapat menggabungkan menjadi kelompok besar. Dengan demikian besar atau kecilnya kelompok adalah suatu strategi untuk menyelesaikan permasalahan bukan sekadar membagi anggota. Dengan demikian setiap orang akan berpikir siapa yang dapat menjadi perwakilan (representative) untuk melakukan permufakatan.
4. Setiap siswa diberi tiga token (kupon), kupon tersebut ditulis nama siswa, kelompok serta no absen siswa. Setiap pemegang kupon memiliki hak bicara maksimal lima menit. Setiap siswa akan bertanya dan menyanggah pembicaraan maka siswa harus menyerahkan token (kupon) tersebut pada guru. Token (kupon) untuk berbicara digunakan untuk menjadikan siswa dapat terpantau kalau mereka melakukan dominasi pembicaraan dan yang pasif akan terpantau pula. Dengan demikian kupon digunakan untuk membatasi siswa yang terlalu dominan serta untuk mendorong siswa yang terlalu pasif agar berani mengemukakan pendapatnya.
5. Guru mempersilahkan siswa untuk membahas bahan musyawarah. Musyawarah merupakan suatu keterampilan, musyawarah bukan given atau datang begitu saja. Musyawarah merupakan keterampilan yang harus dilatihkan kepada siswa secara kontinyu. Sarana dan prasarana musyawarah secara minimal harus dipenuhi misalnya tempat duduk diusahakan jangan bertipe ordinar dan sub ordinar.
6. Guru mempersilahkan salah satu siswa untuk memaparkan hasil musyawarah kelompok. Kondisi ini melatih siswa agar mampu berperan sebagai representative serta siap untuk mewakili. Disamping itu juga melatih siswa untuk berani memaparkan pemikirannya, amanah kepada yang diwakili.
7. Siswa diajak untuk mencari yang terbaik dari setiap pendapat. Keterampilan berpikir harus dikembangkan. Keterampilan mencari data-data yang mendukung suatu pernyataan serta keterampilan

untuk mencari kebaikan dari suatu pendapat (hikmah kebijaksanaan).

8. Siswa dilatih sensitivitas-nya terhadap emosi dirinya serta emosi kelompoknya. Terkadang siswa dapat terpancing emosinya dalam suatu musyawarah, demikian juga dengan kelompoknya karena suatu perkataan dari kelompok lainnya seorang siswa dapat marah atau dendam. Siswa harus dilatih agar dapat mengendalikan emosinya.
9. Siswa diajak untuk menganalisis berbagai pendapat dari Sudut Pandang Diri Sendiri (SPDS) serta dari Sudut Pandang Orang Lain (SPOL). Pemahaman terhadap sudut pandang orang lain dan sudut pandang diri sendiri harus dilakukan pada kelompok yang sedang bermusyawarah. Sehingga masing-masing kelompok akan memahami posisinya untuk mencari solusi yang terbaik, bukan menang kalah.
10. Siswa kemudian mengemukakan pendapatnya. Dalam mengemukakan pendapat siswa dijaga agar tidak terjadi tekanan dari kelompok serta tekanan dari kelompok lainnya. Siswa harus dijaga untuk bebas mengemukakan pendapatnya dan berani untuk mengemukakan pendapatnya. Siswa yang kategori pemalu harus difasilitasi agar memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapatnya.
11. Siswa mengambil kesimpulan. Disamping pengembangan kemampuan sensitifitas diri siswa; siswa diajak untuk merasakan berbagai pendapat orang lain,

demikian pula dengan pendapatnya. Sensitifitas ini untuk meminimalisir timbulnya dominasi diantara sesama. Ketika seseorang merasa terlalu dominan, maka hendaknya dia segera menyadari sejauhmana dominasinya, kemudian berusaha untuk mengurangnya. Demikian juga dengan siswa lainnya, sehingga dengan berlatih sensitivitas ini maka siswa berlatih untuk mengendalikan dirinya sendiri. Ketika semua orang berlatih untuk mengendalikan dirinya maka akan timbul kemampuan tenggang rasa.

Pengembangan kemampuan demokratis lainnya adalah pengembangan kemampuan retorika. Siswa harus dididik agar mampu menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan. Siswa diajarkan menuliskan pendapat-pendapat, permasalahan-permasalahan di sekitar. Kemampuan ini diasah dengan mengembangkan citizen project. Di samping pengembangan retorika serta citizen project maka juga dilakukan dengan simulasi berbagai kegiatan yang relevan dengan kegiatan demokrasi seperti simulasi pemilihan umum, simulasi kampanye, simulasi sidang parlemen, dan simulasi membuat rancangan Undang-Undang.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah musyawarah sebagai solusi proses politik Indonesia modern ini adalah sebagai berikut: 1) Praktik musyawarah biasanya

dilakukan dengan diskusi dengan mengelompokkan siswa dalam jumlah antara 5 s.d. 10 orang. Satu kelompok biasanya duduk melingkar, dalam kelompok itu biasanya ditunjuk pimpinan kelompok serta notulen yang akan mencatat setiap usulan atau pernyataan dari anggota kelompok. Anggota kelompok tersebut ada yang pasif tetapi ada yang aktif, ada yang dominan bahkan cenderung mendominasi tetapi adapula kurang partisipasi. Seringkali kita saksikan bahwa praktik pendidikan tidak mencerminkan nuansa yang demokratis, yaitu membiarkan orang yang apatis menjadi apatis serta membiarkan orang yang cenderung mendominasi orang lain menjadi tetap dominan; 2) Kondisi membiarkan orang mendominasi jalannya musyawarah, berarti kita akan melahirkan orang yang tiran dan orang yang tidak berpartisipasi. Karakter demokratis itu menyeimbangkan antara SPOL (Sudut Pandang orang lain) dengan SPDS (sudut pandang dirinya sendiri) ditambah dengan cara penyampaian yang tidak menyinggung orang lain. Dengan demikian untuk meningkatkan kemampuan musyawarah minimal kita harus mengajarkan, menginternalisasi dan membiasakan siswa dengan : 1) mencari inner wisdom, 2) deliberation atau permusyawaratan, dan 3) representative.

Model peningkatan musyawarah yang ditawarkan adalah sebagai berikut: a) Guru memberi pengertian dulu, apa itu musyawarah; b) Guru menyiapkan materi yang akan dimusyawarahkan; c) Kelas dibagi menjadi lima kelompok besar, yang masing-masing terdiri dari 5 sampai dengan 10 siswa; d) Setiap siswa diberi

tiga token (kupon), kupon tersebut ditulis nama siswa, kelompok serta no absen siswa. Setiap pemegang kupon memiliki hak bicara maksimal lima menit. Setiap siswa akan bertanya dan menyanggah pembicaraan maka siswa harus menyerahkan token (kupon) tersebut pada guru; e) Guru mempersilahkan siswa untuk membahas bahan musyawarah; f) Guru mempersilahkan salah satu siswa untuk memaparkan hasil musyawarah kelompok; g) Siswa diajak untuk mencari yang terbaik dari setiap pendapat; h) Siswa dilatih sensitifitasnya terhadap emosi dirinya serta emosi kelompoknya; i) Siswa diajak untuk menganalisis berbagai pendapat dari Sudut Pandang Diri Sendiri (SPDS) serta dari Sudut Pandang Orang Lain (SPOL); j) Siswa kemudian mengemukakan pendapatnya; k) Siswa mengambil kesimpulan. Saran dari penelitian ini adalah kemampuan musyawarah merupakan suatu keterampilan, bukan sesuatu yang sekadar berbicara bersama. Dengan demikian guru harus membuat materi yang dimusyawarahkan dari yang termudah untuk dipecahkan sampai yang sulit untuk dipecahkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Biesta, Gert J.J. 2010. *Learning emocracy in School and Society*. Rotterdam: Sense Publishers
- Kalidjernih, Freddy K. 2011. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan Edisi 3*. Bandung : Widya Aksara Press
- Ramage, Douglas E. 2005. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*.

- Routledge. 11 New Fetter Lane,
London EC4P 4EE
- R. J. G., Claassen. 2009. *New Directions
for the Capability Approach:
Deliberative Democracy and
Republicanism*. *Res Publica* :421–
428
- Saksono, Ign Gatut. 1953. *Pancasila-
Soekarno*. Yogyakarta: CV Urna
Cipta Media Jaya
- Suyahmo. 2014. *Filsafat Pancasila*.
Yogyakarta: Magnum
- Wuryan, Sri. 2006. *Ilmu
Kewarganegaraan (civics)*.
Bandung: Laboratorium
Pendidikan Kewarganegaraan.
- Zamroni. 2011. *Pendidikan Demokrasi
Pada Masyarakat Multikultural*.
Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.